

Dorong Pemkot Cetak Buku Sendiri dan Diedarkan Gratis



Sumber gambar : https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRtPbZmIeZdioqhU2S6unY33D_Pj_Bf8YA0TA&s

ISU – mengenai beban biaya buku pelajaran yang kerap dikeluhkan orang tua siswa di Samarinda kembali menjadi sorotan. Saat ini Pemkot tengah mengkaji beberapa opsi solusi untuk memutus rantai jual-beli buku yang kerap menjadi masalah di tiap tahun ajaran baru.

Pengamat Pendidikan dari Universitas Mulawarman (Unmul), Profesor Susilo mengusulkan beberapa solusi jangka panjang yang inovatif. Dalam pandangan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unmul itu, mencetak buku pelajaran secara massal dan mendistribusikannya secara gratis merupakan solusi yang paling efektif. “Namun, jika anggaran Pemerintah Daerah terbatas, opsi digital seperti buku pelajaran dalam bentuk PDF bisa menjadi alternatif yang layak,” ujarnya.

Setiap siswa terutama di era digital, sudah memiliki akses ke perangkat seperti ponsel pintar. Buku pelajaran dalam bentuk digital dapat dibagikan secara merata kepada seluruh siswa. “Namun, bagi siswa yang tidak memiliki perangkat atau kesulitan mengaksesnya, sekolah dapat menyediakan fasilitas untuk mencetak buku tersebut,” jelasnya.

Dia menekankan pentingnya peran guru dalam proses pembelajaran. Guru harus didorong untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan materi ajar. Misalnya dengan pembekalan pelatihan yang intensif untuk membuat materi ajar yang berkualitas. “Materi ajar tersebut harus relevan dengan kurikulum merdeka, mengakomodasi muatan lokal, dan tidak lagi bergantung pada buku teks yang sudah jadi,” jelasnya.

Guru tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator pembelajaran yang aktif. Siswa akan lebih termotivasi untuk belajar karena materi ajar yang disajikan lebih menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. "Dapat mengurangi ketergantungan pada penerbit buku dan memastikan bahwa setiap siswa memiliki akses yang sama terhadap bahan pembelajaran yang berkualitas," tegasnya.

Sebelumnya, Pemkot Samarinda terus berupaya mencari solusi atas permasalahan jual beli buku pelajaran di sekolah yang menjadi keluhan masyarakat. Setelah adanya aksi demonstrasi oleh para orang tua siswa, Wali Kota Samarinda Andi Harun langsung menggelar rapat koordinasi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Jumat (2/8).

Berdasarkan data yang diperoleh, setiap siswa SD diarahkan membeli sekitar 9 buku penunjang, sedangkan siswa SMP membutuhkan 10 buku penunjang. "Beban biaya yang besar ini tentu sangat memberatkan, terutama bagi orang tua siswa yang kurang mampu," sebutnya.

Saat ini tengah meminta OPD teknis bersama TAPD mengkaji beberapa opsi, misalnya mengalokasikan anggaran APBD untuk pengadaan seluruh buku dengan kebutuhan anggaran Rp62 miliar. Opsi lain tidak mewajibkan buku penunjang, dimana pemerintah akan membeli sebagian buku, agar siswa bisa memakai bersama dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp15-20 miliar.

"Ada pula pengadaan buku bagi siswa tidak mampu yang berjumlah sekitar 30 persen dari total siswa yang ada, dengan kebutuhan anggaran Rp18 miliar. Atau menggunakan modul ajar digital dari Kemendikbudristek. Pada opsi tersebut, pemerintah bisa mencetak sendiri, tentu dengan kualitas berbeda dari penerbit saat ini, dan membutuhkan anggaran Rp20 miliar," singkatnya. **(dra)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Dorong Pemkot Cetak Buku Sendiri dan Diedarkan Gratis, 6/8/2024
2. Kaltimpost.id, Profesor Unmul Dorong Pemkot Cetak Buku Sendiri Diedarkan Gratis, Ajak Guru Kreatif Buat Bahan Ajar, 6/8/2024

Catatan:

1. Dalam Pasal 83 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pendanaan Pendidikan diatur sebagai berikut:
 - (1) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan dapat diberikan dalam bentuk hibah.
 - (2) Hibah dari Pemerintah untuk satuan pendidikan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hibah dari Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diatur lebih lanjut oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri.